

NORMAAL SCHOOL: CIKAL BAKAL BERDIRINYA SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DI KOTA PEMATANGSIANTAR (1918-1991)

Jalatus Habungaran Hasugian¹

¹Universitas Simalungan, Indonesia

Email: jalhs.74@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengeksplorasi hubungan antara berdirinya *Normaal School* tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda di Pematangsiantar dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar pada sekolah-sekolah rendah serta peralihannya menjadi lembaga pendidikan guru pasca kemerdekaan Indonesia yang berlangsung hingga tahun 1991. Lembaga pendidikan keguruan ini beralih menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Pematangsiantar sejak tahun 1992 dan beroperasi sampai sekarang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah: *heuristik*, *kitik (verifikasi)*, *interpretasi*, serta *historiografi*. Berangkat dari pemikiran tersebut dengan menganalisis sejumlah arsip dan dokumen yang pada objek penelitian, dikomparasikan dengan bukti-bukti bagian lainnya dari objek yang diteliti, serta menggabungkannya ke dalam kelompok-kelompok lainnya, maka terbentuklah deskripsi historiografis dari keseluruhan objek penelitian dalam bentuk tulisan hasil penelitian. Informasi penelitian ini diperoleh berdasarkan dokumen milik SMA Negeri 4 dan SD Negeri 0122350 Jalan Sutomo Pematangsiantar sebagai kelanjutan dari *Normaal School* yang tidak diterbitkan, maupun koran-koran terbitan era kolonial, buku-buku bertema Sejarah Nasional maupun sejarah kota Pematangsiantar dari Perpustakaan Universitas Simalungun, Perpustakaan Sintong Bingei Pematangsiantar, serta wawancara dengan informan yang dinilai berkompeten memberikan informasi.

Kata Kunci: *Normaal School*, Era Kolonial, Sekolah Pendidikan Guru, Pematangsiantar

Abstract: This research is intended to examine and explore the relationship between the establishment of the *Normaal School* in 1918 by the Dutch colonial government in Pematangsiantar and meeting the need for teaching staff in lower schools and its transition to a teacher education institution after Indonesian independence which lasted until 1991. This teacher education institution changed has been Pematangsiantar State High School (SMA) 4 since 1992 and operates until now. This research uses historical methods with the steps: *heuristics*, *criticism (verification)*, *interpretation*, and *historiography*. Starting from this idea, by analyzing a number of archives and documents that are part of the research object, comparing them with evidence from other parts of the object under study, and combining them into other groups, a historiographic description of the entire research object is formed in the form of written research results. This research

information was obtained based on documents belonging to SMA Negeri 4 and SD Negeri 0122350 Jalan Sutomo Pematangsiantar as a continuation of the Normal School which were not published, as well as newspapers published in the colonial era, books on the theme of National History and the history of the city of Pematangsiantar from the Simalungun University Library, Library Sintong Bingei Pematangsiantar, as well as interviews with informants who were considered competent in providing information.

Keywords: Normal School, Colonial Era, Teacher Education School, Pematangsiantar

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia terhadap praktik kolonialisme bangsa-bangsa Eropa terutama Belanda. Selama era kolonialisme bangsa Indonesia hidup dalam kemelaratan dan kebodohan yang berkepanjangan. Hal ini merupakan dampak politik eksploitasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1800-an (M.Sirozi, 2005: 9-10).

Kebijakan politik eksploitasi ini diarahkan pada pengerukan kekayaan dari bumi Indonesia demi kepentingan kapitalis kaum kolonial. Puncak politik eksploitasi tersebut ditandai dengan penerapan tanam paksa atau *cultuur stelsel* di Pulau Jawa (Sartono Kartodirdjo, 1975: 7-8).

Namun pada sisi lain, gencarnya tanam paksa yang kian menambah penderitaan rakyat Indonesia, memunculkan kesadaran baru di kalangan tokoh-tokoh politik parlemen Belanda sendiri. Terutama para politisi yang berhaluan humanis, liberalis dan sosial demokrat. Mereka menyampaikan usulan di parlemen Belanda bahwa sudah saatnya untuk memikirkan nasib rakyat di Hindia Belanda (Indonesia). Apalagi pemerintah kolonial Belanda sebelumnya sudah banyak mengeksploitasi kekayaan alam dari bumi Indonesia.

Kaum liberalis juga mendesak pemerintah Kerajaan Belanda untuk meninjau kembali praktik politik kolonialnya di Hindia Belanda. Desakan ini memunculkan wacana politik etis yang harus ditempuh pemerintah Belanda terhadap kaum pribumi sekitar tahun 1900-an. Bentuk politik etis ini antara lain menawarkan kebijakan balas budi atau hutang kehormatan pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia. Salah satu pemrakarsa politik

etis ini, Van Deventer, secara konkrit mengusulkan adanya perhatian serius pemerintah Belanda dalam urusan pendidikan (*education*) kepada rakyat Indonesia (M.C. Ricklefs, 2001: 320).

Lewat kebijakan politik etis inilah akhirnya anak-anak bumi putera (pribumi) punya kesempatan mengecap pendidikan, setidaknya pada tingkat sekolah rendah. Namun untuk kalangan anak-anak bumi putera dari golongan tertentu, tetap dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan banyak diantaranya, berkesempatan mengenyam pendidikan barat karena mendapat subsidi dari pemerintah Belanda.

Kota Pematangsiantar pada waktu itu telah dijadikan basis pemerintahan dan sejumlah kantor perusahaan perkebunan oleh pemerintah kolonial Belanda. Berkenaan dengan itu, Belanda merasa perlu mendirikan lembaga pendidikan dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga administrasi rendahan di pemerintahan maupun di kantor-kantor perkebunan. Pertimbangannya, jika harus mendatangkan tenaga administrasi rendahan dari Eropa (Belanda) tentu akan mengeluarkan biaya sangat besar.

Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka sekolah-sekolah rendah di wilayah Pematangsiantar dan Simalungun. Dalam rangka percepatan penyediaan tenaga terdidik, pemerintah kolonial Belanda juga memberikan kesempatan kepada kalangan swasta dan lembaga penginjilan (*misionaris atau zending Kristen*) untuk turut membuka sekolah-sekolah bagi kaum pribumi.

Dalam rangka mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah inilah, pemerintah kolonial Belanda kemudian membuka *Normaal School* pada tahun 1918 di Pematangsiantar. Bahkan untuk memacu percepatan ketersediaan guru, pemerintah Belanda membuka kursus (*normaal cursus*) selama 2 tahun bagi calon-calon guru. Sedangkan *Normaal School* merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi kaum pribumi dalam rangka menyiapkan calon-calon guru pada sekolah rendah yang dirintis pemerintah Belanda.

Namun pada tahun 1935, *Normaal School* Pematangsiantar dipindahkan ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Selanjutnya gedung sekolah ini dijadikan Kantor

Pengadilan Negeri (*Landraad*) sampai datangnya tentara Jepang tahun 1942. Pasca kemerdekaan tahun 1945, lokasi tersebut kemudian diambil alih pemerintah Indonesia dan dikembalikan sebagai pusat pendidikan guru. Pada masa revolusi fisik dengan Belanda dan Sekutu (NICA), gedung sekolah ini dijadikan lokasi penampungan pengungsi pegawai negeri yang berasal dari Kota Medan dari tahun 1945-1947 (Dokumen SMA Negeri 4, 1974).

Saat terjadinya agresi militer Belanda tahun 1947, lokasi ini dijadikan sebagai markas mereka sampai tahun 1948. Barulah sejak 1 Agustus 1948, sekolah guru ini kembali dibuka dengan nama *Normaal School* Negeri Sumatera Timur. Selain itu, sebagian lokasi sekolah ini juga dipakai untuk *Kweek School Niauwe Styl* yang berlangsung selama berdirinya Negara Sumatera Timur pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 (Dokumen SMA Negeri 4, 1974).

Lokasi ini sempat pula menjadi tempat belajar Sekolah Guru Atas (SGA) Negeri sejak 1 Januari 1950. Kemudian dirubah lagi menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) sejak 1 Januari 1966 dan Sekolah Latihan SPG. Lulusan SPG Negeri Pematangsiantar inilah yang kemudian banyak direkrut menjadi guru-guru sekolah rendah atau sekolah dasar, khususnya untuk memenuhi kecukupan guru di Sumatera Utara sekitarnya.

Pada tahun ajaran 1991/1992, SPG Negeri ini beralih menjadi SMA Negeri 4 Pematangsiantar dan Sekolah Latihan SPG menjadi SD Negeri 122350 Pematangsiantar. Kedua sekolah ini terus berkembang hingga sekarang dan berada dalam satu kompleks meski terpisah pagar pembatas. Kedua sekolah ini menggunakan gedung lama yang merupakan warisan bangunan pemerintah kolonial Belanda di masa silam yang sekarang telah banyak mengamali renovasi.

Keberadaan *Normaal School* era kolonial Belanda di Pematangsiantar, tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut. Meski pun untuk mendalaminya lebih jauh, perlu ada beberapa item pertanyaan yang diajukan, yakni apa latar belakang dan tujuan sekolah ini dibuka serta bagaimana corak pendidikan di sekolah ini? Selain itu, bagaimana proses

peralihannya sehingga menjadi sekolah pendidikan guru, tentu juga menarik untuk dikaji secara mendalam.

Berkenaan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menganalisis corak pendidikan guru di *Normaal School* era kolonial Belanda serta proses peralihannya menjadi sekolah pendidikan guru pascakemerdekaan Indonesia. Studi pendahuluan yang dilakukan, belum ditemukan adanya penulis lain yang mengkaji tentang keberadaan *Normaal School* di Pematangsiantar. Meski secara umum, sudah ada sejarah pengelolaan sekolah era kolonial Belanda yang telah diteliti dan ditulis secara akademik, serta diterbitkan sebagai buku-buku sejarah tentang perkembangan pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sejarah merupakan segenap perwujudan aktivitas manusia pada masa lampau. Bila dirinci lebih jauh, manusia sebagai pelaku sejarah melakukan beragam aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta demi memperoleh kehidupan yang lebih baik (Hariyono, 1995: 1-2). Sesuai perkembangan ilmu sejarah, kini penggarapan temanya bukan lagi terfokus pada tokoh perlawanan rakyat atau politik semata tetapi sudah berkembang ke bidang lainnya, menyangkut ragam aktivitas manusia, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi maupun pendidikan (Peter Burke, 2001: 20-21).

Berkenaan dengan itu, penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut: *heuristik*, yaitu kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah atau dokumen yang berkaitan dengan keberadaan *Normaal School* di Pematangsiantar sebagai objek penelitian; *kritik (verifikasi)*, yaitu upaya untuk meneliti lebih lanjut apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya; *interpretasi*, yaitu strategi menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi; serta *historiografi*, yakni penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk narasi sejarah dari objek yang diteliti (Helius Sjamsuddin, 2007: 85-87).

Pada bagian lain, Sartono Kartodirdjo juga menegaskan, agar metode sejarah memiliki makna yang utuh dan komprehensif, maka dalam melaksanakan penelitian sejarah seyogyanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dalam historiografi diperlukan pendekatan fenomenologis yang didasarkan atas pengalaman dan pemahaman pelaku sendiri.
- (2) Pengungkapan yang bersifat reflektif, sehingga dimungkinkan tetap adanya kesadaran akan subjektivitas diri sendiri, seperti kepentingan, perhatian, logika, metode, serta latar belakang historisnya.
- (3) Bersifat komprehensif, sehingga memiliki relevansi terhadap realitas sosial dari pelbagai tingkat dan ruang lingkup.
- (4) Perlu memiliki relevansi terhadap kehidupan praktis (Sartono Kartodirdjo, 1992: 236).

Tentunya metode sejarah kritis juga diperlukan untuk menemukan bukti-bukti masa lampau; untuk mengorganisir dan menafsirkan serta untuk menunjukkan sedekat mungkin dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi, bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi (Dudung Abdurahman, 2007: 21).

Berangkat dari pemikiran tersebut, dengan menganalisis sejumlah bukti dari suatu bagian dan dikomparasikan dengan bukti-bukti bagian lainnya dari objek yang diteliti, serta menggabungkannya ke dalam kelompok-kelompok lainnya, maka terbentuklah deskripsi historiografis dari keseluruhan objek penelitian yang siap dituliskan dalam bentuk laporan penelitian (Agus Mulyana, 2009: 2-3).

Informasi dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan berita-berita koran era kolonial, arsip yang tidak diterbitkan maupun buku-buku tentang Sejarah Nasional maupun sejarah Kota Pematangsiantar dari berbagai perpustakaan, yakni Perpustakaan Universitas Simalungun, Perpustakaan Sintong Bingei Pematangsiantar, serta arsip SMA Negeri 4 Pematangsiantar serta SD Negeri 012350 Jalan Sutomo Pematangsiantar sebagai kelanjutan dari *Normaal School* yang semula didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corak Pendidikan Era Kolonial Belanda

Dengan adanya kesempatan memperoleh pendidikan walau hanya sedikit, telah melahirkan elit baru bangsa Indonesia yakni golongan intelektual (terpelajar). Mereka

inilah yang akhirnya menjadi pelopor, penggerak dan pemimpin pergerakan nasional menuju kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia.

Meski perlu dicermati, bahwa tujuan awal mendirikan lembaga pendidikan yang diprakarsai pemerintah kolonial Belanda sejatinya bukanlah dalam rangka untuk kepentingan mencerdaskan rakyat Indonesia tetapi semata-mata untuk kepentingan Belanda. Terutama dalam rangka mengisi jabatan rendah dalam pemerintahan dan tenaga kerja di perusahaan swasta yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda dan mitra bisnisnya dari negara-negara asing lainnya.

Pemerintah kolonial Belanda waktu itu mengeluarkan semacam ketentuan bahwa yang dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah maupun kepala daerah, harus memenuhi syarat pendidikan menurut standar Barat. Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan (*onderneming*), pertambangan dan pabrik diperlukan tenaga terdidik yang cakap dan terampil. Karena itulah, lembaga pendidikan yang pertama-tama didirikan untuk orang Indonesia adalah lembaga pendidikan rendah.

Jika ditelusuri dari berbagai catatan-catatan sejarah yang ada, landasan utama pendidikan pada zaman Hindia Belanda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda berusaha untuk tidak memihak kepada salah satu agama tertentu.
2. Pendidikan tidak diusahakan untuk dapat hidup selaras dengan lingkungan, tetapi supaya anak didik di kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi untuk kepentingan pemerintah.
3. Sistem persekolahan disusun menurut perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
4. Pada umumnya pendidikan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elite sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia (Sartono Kartodirdjo, 1975: 43)

Berdasarkan tujuan itu, awalnya siswa yang dapat diterima di sekolah-sekolah bentukan Belanda hanyalah anak-anak golongan tertentu. Misalnya pemimpin masyarakat atau tokoh terkenal yang disenangi Belanda. Namun sebagian ada juga merupakan anak-

anak dari orang-orang yang diharapkan Belanda kelak bersedia bekerja sama untuk kepentingan Belanda.

Dampak pembukaan sekolah-sekolah oleh pemerintah Belanda ini, memunculkan golongan terpelajar. Mereka melihat secara langsung bagaimana kemelaratan masyarakat pada umumnya sehingga menumbuhkan cara berfikir yang kritis. Timbul daya kritik yang tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membuat kemiskinan dan kesengsaraan hidup masyarakat berkepanjangan. Daya kritis itu akhirnya mereka lontarkan pada bangsa Belanda yang sedang berkuasa di Indonesia.

Mereka yang telah berfikiran maju ini kelak melahirkan aktivis atau pejuang-pejuang menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka inilah yang kelak menjadi pelopor dan pendobrak kekuasaan Belanda dari Indonesia. Pada waktu itu mereka hanya dapat berdiam diri, karena jumlah mereka masih sedikit dan tidak semua tamatan sekolah berfikiran kritis. Banyak juga diantaranya yang betul-betul bersedia bekerja dengan Belanda dan tidak mau ikut dengan perjuangan bangsanya (S.Nasution, 2001: 5-7).

Di kalangan orang-orang Belanda sendiri kemudian timbul aliran untuk memberikan sebagian dari keuntungan yang diperoleh orang-orang Belanda selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini berpendapat bahwa kepada orang-orang bumi putera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat melalui pendidikan secara barat. Berkaitan dengan arah etis yang menjadi landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran khusus. Terutama pendidikan dan pengetahuan barat harus diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumi putera, serta pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumi putera yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Atas dasar itulah, maka corak dan sistem pendidikan di Hindia Belanda pada abad 20 ditempuh melalui dua jalur. Pada satu pihak, diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan industri, sedangkan di lain pihak terpenuhinya tenaga kerja menengah dan rendah yang juga telah berpendidikan.

Walaupun jumlah sekolah makin bertambah, namun karena pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan kepada kalangan swasta untuk membuka lembaga pendidikan, rakyat pribumi hampir tidak mempunyai arti untuk bersekolah. Persepsinya, sekolah sangat sulit bagi rakyat biasa, terutama karena menyangkut perihal pembiayaan. Apalagi sekolah didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga terlatih yang murah dalam rangka merealisasikan kepentingan Belanda. Oleh karenanya siswa yang dapat diterima pada sekolah-sekolah tersebut juga amat terbatas jumlahnya.

Memenuhi Kebutuhan Guru pada Sekolah-sekolah Rendah

Kota Pematangsiantar pada era kolonial Belanda telah dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan basis kantor pengelolaan berbagai perusahaan perkebunan. Oleh karenanya, pemerintah Belanda merasa perlu membangun lembaga pendidikan dalam rangka menyiapkan tenaga administrasi pada bidang-bidang tertentu. Pertimbangannya, jika mereka harus mendatangkan tenaga administrasi rendahan dari kalangan orang-orang Eropa tentu akan mengeluarkan biaya besar.

Oleh karena itulah pemerintah kolonial Belanda berinisiatif membuka sekolah-sekolah rendah di wilayah Pematangsiantar dan Simalungun. Latar belakangnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga guru pada sekolah-sekolah rendah untuk kaum pribumi. Atas dasar itulah maka Belanda membuka *Normaal School* di Pematangsiantar, sebagaimana yang telah dilakukan pada sejumlah wilayah lainnya di Hindia Belanda. Mereka yang dapat diterima menjadi siswa di sekolah ini merupakan lulusan *Vervolgschool* (Sekolah Kelas II). Jika sudah lulus dari *Normaal School*, mereka mempunyai kewenangan untuk mengajar sampai kelas tertinggi di sekolah rendah kaum pribumi.

Selain *Normaal School*, pemerintah kolonial Belanda sebelumnya juga telah membuka jenis sekolah lainnya, yakni *Kweek School*, yang siswanya merupakan lulusan *Hollands Inlandse School (HIS)* atau sederajat. *Kweek School* merupakan Sekolah Pendidikan Guru yang sudah lebih dulu ada ketimbang *Normaal School*. Lama belajarnya 6 tahun, kemudian 5 tahun dan akhirnya menjadi 4 tahun. Bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Lulusan *Kweek School* juga mempunyai wewenang untuk

mengajar sampai kelas tertinggi. Selain itu ada lagi *Hogere Kweek School (HKS)* yang merupakan lanjutan dari *Kweek School*. Meski sama-sama berstatus sebagai sekolah guru namun jenjang *Hogere Kweek School* lebih tinggi dari *Kweek School* (kira-kira sejenis dengan pendidikan Diploma di era sekarang).

Namun kemudian diberikan pula kesempatan kepada lulusan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)* masuk ke *Kweek School*. MULO merupakan sekolah setingkat SMP pada era kolonial Belanda di Indonesia. Lama belajarnya 3 tahun dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Selain itu juga ada *Normaalcursus* selama 2 tahun yang siswanya merupakan peserta kursus atau magang. Kursus diberikan di petang hari pada beberapa kota besar. Dengan memiliki ijazah *Normaalcursus* mereka sudah bisa menjadi pegawai negeri (Syaharuddin, 2019: 44).

Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga memberikan kesempatan kepada kalangan swasta untuk turut mengelola lembaga pendidikan, seperti yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga *zending* (misionaris) asal Eropa. Sekolah-sekolah lainnya waktu itu juga sudah ada di Jalan Simarito, Jalan Gereja (sekarang sekolah YP. HKBP) yang dibuka sejak 1907 oleh para misionaris Jerman. Kalangan Tionghoa juga diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mendirikan dan mengelola sekolah. Maka berdirilah *Cung Hua School* (sekarang Perguruan Sultan Agung) yang telah beroperasi sejak tahun 1909 sebagai pusat pendidikan orang-orang Tionghoa di Pematangsiantar.

Sampai pada tahun 1932, lembaga *Rijnsche Zending* juga telah mengelola sebanyak 81 *volksscholen* (sekolah nasional), 6 *vervolgsholen* (sekolah lanjutan), 2 *schakelscholen* (sekolah lanjutan penghubung), 1 HIS dan satu lagi *normaal leergang* (kursus untuk melatih guru rakyat). Jumlah peserta didik di keseluruhan sekolah ini mencapai 10.000 orang. Hal itu selalu menjadi misinya yang bertujuan untuk memasukkan ke dalam model pendidikannya di berbagai tempat di Hindia Belanda. Sejak tahun 1916, guru misionaris ED. Muller di Pematangsiantar dari Medan turut menyediakan buku-buku bacaan untuk sekolah rakyat (*De Sumatra Post*, 19 Juli 1932)

Pengantar Bahasa Melayu, Fasilitas Belajar *Normaal School* Memadai

Normaal School merupakan sekolah biasa yang dibuka khusus untuk mendidik dan melatih calon-calon tenaga pengajar pada sekolah-sekolah pribumi Kelas II, termasuk sekolah-sekolah desa. Pembukaan *Normaal School* di Sumatra, yakni di Pematangsiantar, awalnya merupakan gabungan sekolah dari Langsa dan di Padang Pandjang (untuk kalangan putri). Sekolah ini menyediakan staf pengajar hanya untuk sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya.

Siswa *Normal School* merupakan siswa sekolah Kelas II yang berasal dari berbagai tempat di Sumatra. Rata-rata usia para siswa saat masuk ke *Normal School* 14-15 tahun dan mereka harus menempuh pendidikan selama 4 tahun. Setelah tamat mereka kembali ke sekolah asal sebagai asisten guru, di mana nantinya mereka bisa juga menjadi kepala sekolah. *Normaal School* di Pematangsiantar menjadi lebih besar karena adanya perpindahan siswa dan staf pengajar dari Langsa (Aceh). Setelah dialihkan ke Pematangsiantar, dua tahun kemudian tidak ada siswa baru yang diterima dan *Normaal School* di Langsa langsung ditutup (*De Sumatra Post*, 19 Juli 1932).

Biaya pembangunan *Normaal School* Pematangsiantar diperkirakan lebih dari f 200.000 (gulden). Apalagi bangunannya tergolong megah dengan maksud agar proses pendidikan di sana berlangsung dengan baik dan memberikan rasa nyaman kepada peserta didiknya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda juga telah memberikan izin alokasi anggaran sebesar f 30.000 untuk penyediaan tanah yang diperlukan. Biaya tersebut juga termasuk penyediaan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pendirian gedung *Normaal Schoool* bagi guru pendamping pribumi di Pematangsiantar (*De Sumatra Pos*, 17 Juni 1918 dan *Lokomotif*, 07 Juni 1918).

Gubernur Jenderal Hindia Belanda telah memutuskan bahwa di Makassar dan Pematangsiantar (Pantai Timur Sumatra) akan didirikan *Normaal School* dengan masa belajar selama empat tahun untuk pelatihan guru asisten penutur asli. Teknis pendirian dan waktunya ditentukan oleh Direktur Pendidikan Hindia Belanda, Sementara dana yang disediakan tidak lebih dari f 9.600 untuk biaya pengajaran pertama di masing-masing *Normaal School* yang disebutkan pada kedua lokasi tersebut (*De Nieuwe Vorstenlanden*, 21 Juni 1918)

Peresmian gedung *Normaal Schoool* Pematangsiantar dilakukan bersamaan dengan peresmian jembatan Marihat (*Marihatweg*) yang berada di pusat kota yang juga baru dibangun pada tahun 1918 (sekarang jembatan ini berada di atas sungai Bah Bolon Jalan Diponegoro). Meski diresmikan, sebenarnya lembaga pendidikan untuk kalangan pribumi ini masih banyak yang harus dilengkapi meski untuk sementara telah dapat dipergunakan. Begitu pun masih dibutuhkan waktu beberapa bulan, mungkin beberapa tahun ke depan, agar kompleks *Normaal Schoool* tersebut benar-benar rampung secara keseluruhan (*De Sumatra Post*, 09 April 1918).

Normal School Pematangsiantar dilengkapi dengan berbagai fasilitas yakni ruangan belajar lengkap dengan asrama, termasuk siswa yang transfer atau pindahan dari Langsa. Akibat adanya siswa transfer ini, saat pertama dibuka kelasnya bertambah menjadi 6 kelas dengan jumlah siswanya 109. Padahal menurut formasi normal, seharusnya jumlah siswanya hanya 100 orang. Mereka diasuh oleh 5 orang guru pribumi dengan direktornya orang Eropa, J.H. Klein (*Deli Courant*, 7 Oktober 1924).

Wilayah naungan *Normal School* ini meliputi Pantai Timur Sumatera, Aceh, Tapanuli dan Riau. Kompleks sekolah ini berdiri di atas lahan berbentuk segitiga di perbatasan Kota Pematangsiantar. Sekolah ini memiliki pelataran yang luas serta dilengkapi dengan bangunan utama di bagian pelataran bawah. Sedangkan di bagian pelataran atas berbentuk segitiga, terdapat rumah direktur. Diantara dinding bangunan utama, terdapat empat pemondokan atau asrama, yakni dua buah di setiap sisi poros kompleks sekolah.

Dari rumah direktur terlihat pemandangan menyusuri garis sumbu, melewati tengah kompleks yang dirancang hampir simetris hingga pintu masuk utama. Jika ditilik dari gambaran kompleksnya, dapat dikatakan bahwa bangunan ini terkesan kokoh meski sederhana. Konstruksinya yang kokoh meski tanpa kemewahan, berpadu dengan tata letak dan perabotannya yang terkesan praktis dan rasional. Bekas rumah direktur ini hingga sekarang masih tampak bagus dan terawat. Letaknya berada di pertigaan antara Jalan Sutomo, Jalan Merdeka dan Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Medan, bersebarangan dengan Tugu Wahana Tata Nugraha.

Di sekitar bangunan induk, di sebelah kiri pintu masuk terdapat *gimnasium*, ruang kelas fisika, ruang tamu dan ruang kelas, di sebelah kanan kantor direktur dan dua ruang kelas. Di sebelah kanan gedung induk terdapat sekolah pelatihan dengan 6 ruangan untuk 5 kelas. Kelas awal tidak *double* tetapi dibagi menjadi 2 kelas.

Di belakang bangunan induk terdapat 4 buah pemondokan yang masing-masing terdapat tempat tinggal guru dan 2 buah pemondokan di setiap sisi porosnya. Tiap pemondokan terdiri dari satu asrama dengan 5 ruang belajar sebagai galeri belakang. Ruang tamu guru di masing-masing pemondokan terletak sedemikian rupa sehingga memiliki pemandangan dari galeri belakang asrama dan ruang belajar terkait (*Deli Courant*, 7 Oktober 1924).

Kompleks ini juga difasilitasi ruang makan bersama yang sekaligus berfungsi sebagai ruang relaksasi, terutama untuk acara kumpul-kumpul yang meriah (sekarang digunakan sebagai Aula SMA Negeri 4). Selain itu juga dipergunakan untuk pertunjukan teater, dapur besar dan gedung pelayanan lainnya. Kemudian di luar bangunan induk terdapat lapangan olah raga serta taman yang luas. Pendidikan dan pengajarannya ditempuh selama empat tahun pada kelas satu, dua dan tiga. Sedangkan pada tahun keempat kegiatan belajar ditambah dengan latihan praktik mengajar di sekolah tempat pelatihan.

Selain belajar di ruang kelas, para siswa juga terkadang diajak belajar di luar sekolah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang dunia luar sekaligus rekreasi. Seperti yang pernah mereka lakukan pada hari Senin hingga Kamis tanggal 6 sampai 9 Maret 1922. Dipimpin langsung oleh Direktur *Normaal School*, J.W Kouwe didampingi salah seorang guru, para siswa kelas III dan IV melakukan *school trip* ke Medan, Belawan dan sekitarnya. Tujuannya antara lain untuk mengunjungi institusi atau tempat-tempat penting. Senin sore kunjungan dilakukan ke bengkel DSM (perusahaan kereta api) di Poeloe Berajan. Selasa sore giliran stasiun uji Avros, percetakan Varekamp dan Sjarikat Tapanoeli. Pada hari Rabu pagi berkunjung ke Belawan melihat pelabuhan kapal laut.

Atas seizin kapten kapal "Rumphius" para siswa melihat aktivitas pelabuhan. Mereka disambut hangat dan langsung dibimbing oleh seorang karyawan perusahaan

kapal Grotius bersama pihak Manajemen Pelabuhan. Rombongan juga disuguhkan minuman dan diajak berkeliling berbagai perbengkelan atau tempat kerja khusus. Di Poeloe Brajan, mereka melihat mesin untuk pengerjaan besi baja. Di perusahaan Varekamp mereka mengamati mesin penyusunan huruf dan pengepres silinder.

Di Belawan, para siswa tampak kagum melihat kapal "Rumphius" termasuk kapal keruk pengisap lumpur dan mesin pengerukan Grotius dilihat dengan penuh apresiasi. Di stasiun percobaan, perhatian khusus diberikan pada penyebab penyakit dan hama pada tanaman. Pada hari Kamis pagi harinya rombongan pulang ke Pematangsiantar. Mereka benar-benar puas dengan apa yang dilihat dan dinikmati. Sebuah perjalanan edukatif, dimana hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan dapat dipadukan (*De Sumatra Post*, 03 November 1922). J.W. Kouwe menjabat sebagai Direktur Normaal School sampai tahun 1932 dan diberhentikan dengan hormat dari dinas nasional (*De Sumatra Post*, 07 Mei 1932).

Proses pembelajaran diselenggarakan dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Para siswa mengikuti proses belajar di dalam kelas pada pagi hari. Sedangkan untuk siswa kelas 4, pada sore harinya sebagian pergi ke sekolah pelatihan yang dibangun di dekat lokasi sekolah sebagai fasilitas, sebagian lagi pergi ke sekolah di Kampung Kristen (sekarang merupakan sekolah di bawah naungan YP-HKBP).

Selain praktik mengajar, pada tahun keempat, pada dasarnya merupakan pengulangan pendidikan tiga tahun sebelumnya. Sekolah pelatihan mempunyai periode pembelajaran terpisah, yang berarti 2 kelas digabung dalam satu ruangan secara berurutan agar jumlah staf pengajar yang dibutuhkan tercukupi. Agar proses belajar lebih praktis, maka diatur jadwal kerja sedemikian rupa karena jumlah staf pengajar yang sedikit dapat mencukupi.

Para siswa membuat sendiri banyak bahan pembelajaran, termasuk gambar-gambar dinding bagi yang menunjukkan bakatnya menggambar. Sedangkan untuk jadwal hariannya, siswa laki-laki mempunyai tambahan belajar wajib selama 2 sampai 3 kali sebulan pada pukul 4 hari Jumat dan Sabtu, kecuali kelas tertinggi yang masih dalam tahap pelatihan.

Para guru pribumi bergiliran bertanggung jawab atas pergantian jadwal harian untuk pengawasan wajib belajar, kontrol belajar dan lain-lain. Pada awal dibuka, siswa *Normal School* mendapat materi pembelajaran gratis, pendidikan gratis dan makanan serta penginapan gratis. Untuk mengatasi biaya tambahan pemberian makan siswa di *Normaal School* yang disebabkan adanya kenaikan biaya tahunan di atas normal, dananya kini telah dialokasikan ke anggaran pemerintah daerah (*De Sumatra Post* 19 Oktober 1920).

Mereka setahun sekali juga mendapatkan uang sebesar *f*4 (gulden) untuk biaya kecil dan perjalanan gratis dari dan ke tempat tinggal mereka. Namun sejak tahun 1924, mereka harus membayar biaya sekolah sebesar *f* 2,50 per bulan. Dispensasi gratis hanya dapat diberikan jika kepala daerah memberikan surat pernyataan tidak mampu kepada siswa (*Deli Courant*, 7 Oktober 1924).

Guru pribumi *Normaal School* juga ada yang berasal dari *Kweek School* di Medan. Penempatan mereka awalnya menjadi asisten guru, kepala sekolah pribumi dan setelah itu dapat diangkat menjadi pengawas sekolah dan guru di *Normaal School*. Pendidikan di *Normaal School* secara khusus ditujukan untuk tujuan masa depan siswa dengan cakupan yang lebih luas.

Oleh karena itu mereka juga dibekali dengan ilmu aritmatika, akuntansi komersial, geografi dan sejarah, politik dan ekonomi. Setelah lulus, penempatannya dilakukan sesuai sekolah asal mereka dengan memperhatikan kemampuan yang sudah terbukti dapat diandalkan sebagai guru. Sementara itu, penutupan sekolah sejenis di Langsa juga mempunyai dampak ke Sumatera Utara yang mempunyai sekitar 500 sekolah pribumi.

Pada tahun 1928, lulusan asal sekolah di Langsa yang memenuhi syarat untuk ditempatkan berjumlah 20 orang namun 6 orang diantaranya belum bisa langsung ditempatkan. Untuk di Pematangsiantar masing-masing 21 dan 3 orang dari total 41 lulusan, dan 9 orang belum bisa ditempatkan. Salah satu penyebabnya adalah, surplus mungkin akan sedikit lebih besar pada tahun 1924. Namun hal ini telah diperhitungkan dengan memperlambat penerimaan siswa, sekolah-sekolah baru juga terus dibuka. Sementara selalu ada lowongan terutama karena kematian (*Deli Courant*, 7 Oktober 1924).

Dalam kurun waktu tahun antara tahun 1920 sampai 1935, pemerintah kolonial Belanda juga banyak membuka sekolah-sekolah rendah (sekolah dasar) di wilayah kota Pematangsiantar dan di desa-desa wilayah Simalungun bekerja sama dengan para missionaris Jerman. Ketika itu pendidikan memang dijadikan sebagai salah satu misi pelayanan utama dalam menyebarkan Injil Kristen di wilayah Permatangsiantar dan Simalungun.

Namun pada tahun 1932, sudah tidak ada lagi siswa baru yang diterima di *Normaal School* Pematangsiantar karena sudah tidak ada lagi siswa kelas satu. Sebelumnya pekan lalu, sebanyak 28 putra dan 24 putri, serta 10 siswa tambahan telah lulus ujian akhir (*De Sumatra Pos*, 31 Mei 1932). Hingga akhirnya berdasarkan laporan resmi dari Buitenzorg, *Normaal School* putra negeri di Serang, Salatiga, Pematangsiantar dan *Normaal Schoool* putri di Soerakarta telah ditetapkan untuk ditutup secara permanen (*De Sumatra Pos*, 13 Juni 1934).

Beralih Jadi Gedung Pengadilan dan Markas Militer

Pada tahun 1935, *Normaal School* dipindahkan ke Padang Panjang, Sumatera Barat oleh pemerintah kolonial Belanda. Gedung sekolah ini kemudian dipakai Belanda sebagai Gedung dan Kantor Pengadilan Negeri (*Landraad*) sampai kedatangan Jepang ke Indonesia tahun 1942. Kantor Pengadilan ini kemudian dipindahkan lagi ke Jalan Jenderal Sudirman Pematangsiantar dan menggunakan bangunan sendiri yang telah ada dibangun sebelumnya oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1904 sebagai gedung *kerapatan na bolon*.

Ketika dibangun kolonial Belanda, gedung Pengadilan Negeri tersebut berarsitektur Eropa dan sempat diperuntukkan sebagai Kantor Asisten Residen. Namun kini gedung tersebut sudah tidak ada lagi sehubungan dengan renovasi Gedung Pengadilan Negeri Pematangsiantar sekitar tahun 2020 lalu.

Menyusul pecahnya Perang Dunia II yang disebabkan invansi tentara Jepang tanggal 7 Desember 1941 ke Mancuria (Cina), runtuhlah sistem pemerintahan kolonial Belanda beserta sistem pendidikannya pada tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia justru mengalami penurunan. Angka buta huruf menjadi sangat

tinggi, walaupun telah ada usaha pemberantasan buta huruf. Pada masa itu, sistem pendidikan dan kurikulumnya ditujukan untuk keperluan Perang Asia Timur Raya, dimana Jepang akan menghadapi tentara sekutu yang dimotori Amerika (Edi Saputra, 1985; 65-70).

Meski demikian telah terjadi penghapusan sistem dualisme dan konkordansi dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan terbuka untuk semua anak Indonesia, sehingga semua siswa mendapat kesempatan yang sama. Inilah untuk pertama kali terjadi proses demokratisasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang, lokasi sekolah ini dipergunakan sebagai markas tentara, gudang penyimpanan amunisi, persenjataan serta kegiatan latihan kemiliteran. Karena itulah, praktis tidak ada kegiatan pendidikan di lokasi ini sejak tahun 1935 sampai dengan masa kemerdekaan tahun 1945.

Pada saat revolusi fisik antara Indonesia dengan Belanda (Sekutu) sekolah ini dijadikan tempat penampungan pengungsi pegawai negeri yang berasal dari Kota Medan dari tahun 1945-1947. Pada masa agresi militer Belanda tahun 1947, lokasi ini digunakan Belanda sebagai markas sampai tahun 1948. Konon dari lokasi kompleks sekolah ini dulunya terdapat terowongan bawah tanah yang menembus ke Sekolah Tinggi Teologia (STT) HKBP. Terowongan yang kabarnya dibangun pada masa Jepang ini dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi Perang Asia Timur Raya, dimana Jepang akan berhadapan dengan pasukan sekutu. Namun hingga kini, belum ada penelitian yang lebih intensif dilakukan untuk membuktikan sejauhmana kebenaran informasi tersebut (Wawancara, Hotlen Manik: 2024).

Waktu itu Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik, sehingga membentuk berbagai organisasi semi militer dan organisasi militer. Pembentukan organisasi semi militer seperti *Seinendan* dan *Keibodan*. Para pemuda yang berusia antara 15-25 tahun berhak masuk menjadi anggota *Seinendan*. *Seinendan* didirikan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Militer Jepang memutuskan untuk membentuk satuan tentara pribumi yang akan mempertahankan negaranya sendiri kemungkinan kembalinya kekuasaan negara-negara kolonialis Barat. Di Indonesia, satuan tentara pribumi ini kemudian dikenal sebagai Tentara Pembela Tanah Air (Peta). Tentara Peta dan *Heiho* sama-sama dijadikan sebagai alat mempertahankan Indonesia dari tekanan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik (Anonim, 1984).

Cikal Bakal Lahirnya Pendidikan Guru di Pematangsiantar

Pasca kemerdekaan tahun 1945, lokasi sekolah ini diambil alih pemerintah Indonesia dan dijadikan kembali sebagai pusat pendidikan. Menteri Pendidikan Indonesia ketika itu, Ki Hajar Dewantara, beberapa waktu sesudah proklamasi kemerdekaan langsung mengeluarkan instruksi. Isinya menyerukan kepada para guru supaya mengganti sistem pendidikan kolonial yang lebih mengutamakan nilai-nilai patriotisme. Selain itu anak yang berumur 8 tahun diwajibkan memperoleh pendidikan tingkat sekolah dasar.

Pelaksanaan wajib belajar ketika itu menghadapi berbagai masalah, terutama karena jumlah sekolah dan guru belum memadai untuk mendukung program wajib belajar yang akan dilaksanakan. Jumlah guru yang dididik masih sangat terbatas, karena hanya terdapat tenaga pengajar lulusan sekolah-sekolah guru zaman kolonial Belanda. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia kemudian berupaya membuka sekolah-sekolah guru yang baru. Selain itu, guna mempercepat, pemerintah juga meneruskan sekolah-sekolah yang sudah sempat dibuka pada zaman Belanda, seperti bekas *Normaal School* yang pernah ada di Pematangsiantar.

Sebagai kelanjutannya, sejak 1 Agustus 1948 sekolah ini dibuka kembali dengan nama *Normaal School* Negeri Sumatera Timur. Selain itu, sebagian lokasi sekolah ini juga dipakai untuk *Kweek School Niauwe Styl* yang berlangsung selama berdirinya Negara Sumatera Timur. Wilayah Pematangsiantar dan Simalungun ketika itu termasuk dalam teritorial Negara Sumatera Timur yang berkedudukan di Kota Medan.

Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949 dan memasuki tahun ajaran baru 1950/1951 *Kweek School Niauwe Styl* ini kemudian dirubah menjadi Sekolah Guru Atas (SGA) dengan masa pendidikan selama 6 tahun. Siswa SGA ini mula-mula

adalah siswa-siswa *Normaal School* dan *Kweek School* yang telah duduk di tingkat empat (Dokumen SMA Negeri 4, 1974).

Status sekolah ini kemudian diresmikan menjadi Sekolah Guru Atas (SGA) Negeri pada tanggal 1 Januari 1951 dengan *Instaling Besluit* (Surat Keputusan) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1296/B.II/52 tertanggal 2 Mei 1952. Sedangkan lokasi yang sebelumnya dijadikan tempat praktik siswa-siswa *Normaal School* tetap dijadikan sebagai sekolah laboratorium, sebagai tempat para siswa SGA berpraktik dan latihan mengajar. Pada tanggal 1 Januari 1966, SGA Negeri ini dirubah lagi menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri.

Para Kepala Sekolah yang pernah menjadi pimpinan di SGA/SPG Negeri antara lain: J. Neerwald (1949-1951); J. Siregar (1951-1966); Drs.TM.Hutauruk (1975-1985); B. Tampubolon (1985-1990) dan Drs.PM.Sitinjak (1990-1994) sampai ditutupnya SPG Negeri dan beralih menjadi SMA Negeri 4 Pematangsiantar (Dokumen SMA Negeri 4, 1974).

Selain menjadikan lokasi ini sebagai pusat pendidikan dan pelatihan guru, sejumlah perumahan yang ada di lokasi tersebut juga dimanfaatkan untuk perumahan kepala sekolah dan guru-guru SPG. Lokasi persekolahan seluas hampir 2,5 hektar ini kemudian dibagi menjadi lokasi sekolah dan perumahan guru. Sampai sekarang, perumahan guru-guru tersebut masih berdiri kokoh meski telah ditempati oleh silih berganti penghuni dengan perjanjian tertentu. Kepala SMA Negeri 4 Pematangsiantar, M.Akhyar, menjelaskan, sampai sekarang bangunan perumahan guru yang dibangun era kolonial Belanda ini belum pernah diganti konstruksinya (Wawancara, M.Akhyar, 2024).

Sedangkan ruangan pelatihan dan tempat praktik para siswa sekolah keguruan (SGA dan SPG) tetap dipakai sebagai lokasi pelatihan. Sebab sebagai calon-calon tenaga pendidik, mereka harus mendapatkan pelatihan khusus praktik mengajar dan mendidik secara langsung. Apalagi ketika itu sekolah-sekolah dasar masih sangat terbatas, sementara para siswa *Normaal School* membutuhkan tempat pelatihan. Maka sebagian ruangan dijadikan tempat pelatihan.

Oleh karena fungsi awalnya sebagai sarana pelatihan bagi siswa-siswa SGA dan SPG, maka sejak awal SD Negeri 122350 sekarang, sebutannya adalah Sekolah Dasar Latihan. Pembagiannya menjadi SD Latihan 61 dan SD Latihan 62. Penyebutan istilah 61 ini diambil dari tahun pembukaan sekolah tersebut yakni tahun 1961 dan tahun 1962. Dengan ruang belajar sebanyak 6 kelas, masing-masing sekolah tersebut membagi siswanya dengan sistem belajar bergantian. Caranya, jika siswa SD Latihan 61 belajar pagi mulai pukul 08.00 WIB, siswa SD Latihan 62 belajar siang mulai pukul 13.00 WIB. Demikian sebaliknya terus-menerus dilakukan secara bergantian dengan pergantian waktu yang telah disepakati (Wawancara, Hotlen Manik, 2024).

Pada tahun 1979, sekolah latihan yang tadinya bernama SD Latihan 61 dirubah menjadi SD Negeri 122351. Sekolah ini kemudian dipindahkan ke Kompleks PN Kertas di Jalan Asahan dan sampai sekarang sekolah ini juga masih beroperasi dengan baik. Sedangkan SD Latihan 62 dirubah namanya menjadi SD Negeri 122350 dengan lokasi belajarnya tetap di Jalan Sutomo, bersebelahan dengan SMA Negeri 4 sampai sekarang.

Hal ini pula yang awalnya membuat bangunan komplek SPG dan SD Latihan terbagi dua hingga sekarang. Satu bagian untuk lokasi Sekolah Guru Atas (SGA) yang kemudian menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan sekarang menjadi SMA Negeri 4. Sedangkan sebagaian lagi menjadi lokasi Sekolah Dasar Latihan 61 dan 62 yang sekarang menjadi SD Negeri 122350. Selama masa orde baru hingga sekarang, perkembangan sekolah ini secara fisik hanya mendapatkan renovasi pada beberapa bagian saja, tanpa ada perubahan secara mendasar pada konstruksi utama bangunan.

Beralih Menjadi SMA Negeri 4 Pematangsiantar

Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Pematangsiantar kemudian ditutup dan lokasi belajarnya dialihkan menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Pematangsiantar sejak tahun ajaran 1991/1992. Selama masa transisi atau masa peralihan dari SPG Negeri menjadi SMA Negeri, sekolah ini masih dipimpin oleh Drs. PM Sitinjak. Namun setelah semua siswa SPG Negeri ditamatkan pada tahun ajaran 1991/1992, praktis SPG Negeri Pematangsiantar beralih sepenuhnya menjadi SMA Negeri 4 (Dokumen SMA Negeri 4, 1974).

Sejak dijadikan SMA Negeri 4, yang menjadi pimpinan di sekolah tersebut adalah: Drs.Dervin Simbolon (1994-1997); Drs.R.Boston Hutasoit (1997-2001); Drs.Edyson Panggabean (2001-2004); Drs. Denny Rikson Gultom (2005-2009); Drs. Mauruddin Sitohang (2009); Drs. Helmy, MPd (2010-2014); Drs. Rudolf Barmen Manurung, MPd (2015-2022); Drs. Djasman Sitio (2022-2023) dan Drs. M. Akyar, M.Pd (2023- sekarang).

Sedangkan SD Negeri 122350 yang berada di sebelahnya tetap difungsikan sebagai lokasi belajar untuk sekolah dasar, tidak ada perubahan. Hotlen Manik (64) yang merupakan lulusan SPG Negeri stambuk 1978 dan pernah menjabat Kepala SD Negeri 12350 selama 20 tahun (2000-2020) menjelaskan, bahwa pada masa pemerintahan orde baru, SD Negeri 122350 telah banyak menunjukkan partisipasinya yang sangat besar dalam rangka melakukan tugas pendidikan dan pengajarannya kepada anak-anak di Kota Pematangsiantar. Sekolah ini juga pada masa kepemimpinannya berhasil menjadi sekolah percontohan di Kota Pematangsiantar.

Pada tanggal 23 April 1986, SPG Negeri Pematangsiantar mendapat kunjungan kehormatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Fuad Hasan bersama rombongan. Mereka juga meninjau lokasi SD Negeri 122350 yang memang lokasinya bersebelahan dengan SPG Negeri. Kedatangan Menteri Pendidikan memberikan motivasi tersendiri bagi guru-guru yang ada di kedua sekolah tersebut untuk semakin memacu prestasinya dalam mengembangkan semangat pengajarannya (Wawancara, Hotlen Manik: 2024).

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang awalnya mendirikan *Normaal School* sekadar mempercepat penyediaan kebutuhan tenaga pengajar untuk ditempatkan pada sekolah-sekolah rendah, kelak menjadi cikal bakal lahirnya sekolah pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon guru di era pemerintahan Republik Indonesia. Sekolah yang berada persis di pusat kota Pematangsiantar ini telah banyak melahirkan pendidik generasi bangsa, sejak dibuka oleh Belanda tahun 1918 sampai akhirnya bernama Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang kemudian ditutup pada tahun 1991 dan statusnya beralih menjadi SMA Negeri 4 sampai sekarang.

Sedangkan sekolah laboratorium atau sekolah latihan sebagai tempat praktik siswa *Normaal School*, Sekolah Guru Atas (SGA) dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang kini telah ada pagar pemisahannya meski masih berada dalam satu kompleks tetap dijadikan sebagai Sekolah Dasar dengan nama SD Negeri 122350 Pematangsiantar.

Kedua lembaga pendidikan ini telah banyak memberikan pencerahan strategis di bidang pendidikan bagi masyarakat kota Pematangsiantar sejak era kolonial Belanda sampai sekarang. Kedua sekolah ini merupakan salah satu warisan kolonial Belanda di Pematangsiantar, yang memiliki nilai sejarah bagi perkembangan pendidikan yang dapat menjadi ruang inspirasi bagi generasi bangsa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip dan dokumen SMA Negeri 4 Pematangsiantar Tahun 1974
Deli Courant, Edisi 7 Oktober 1924
De Sumatra Pos, Edisi 31 Mei 1932.
De Sumatra Post, Edisi 19 Juli 1932
De Sumatra Pos, Edisi 13 Juni 1934
De Nieuwe Vorstenlanden, Edisi 21 Juni 1918
Lokomotif, Edisi 7 Juni 1918
Abdurahman, Dudung, 2007, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Arruz Media, Yogyakarta.
Anonim, 1984, *Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera 1945-1950*. Dinas Sejarah Kodam I/BB, Medan.
Burke, Peter, 2001, (terjemahan Mestika Zed & Zulfami), *Sejarah dan Teori Sosial, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta
Hariyono, 1995, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Pustaka Jaya, Jakarta.
Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho
Notosusanto, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid V)*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Kartodirdjo, Sartono, 1987, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid I*, Gramedia, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 2003, *Metodologi Sejarah* (Edisi Kedua), Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Mulyana Agus., Darmiasti, 2009, *Historiografi Di Indonesia: Dari Magis- Religius Hingga Strukturalis*, Refika Aditama, Bandung.
- Nasution, S, 2001, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ricklefs, M.C, 2001, (terjemahan Satrio Wahono, dkk), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta.
- Rochmat, Saefur, 2009, *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saputra, Edi, 1985, *Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan: Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris & Belanda*, Yayasan Bina Satria 45, Jakarta.
- Sirozi, M, 2005, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sjamsuddin, Helius, 2007, *Metodologi Sejarah* (Edisi Revisi), Ombak, Yogyakarta.
- Syahrudin, Heri Susanto. 2019. *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonial Nusantara Sampai Reformasi)*, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.